p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

# MODEL PERILAKU PEMERINTAHAN DAERAH LAHAN BASAH STUDI KASUS: PELAYANAN TRANSPORTASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN

**Andi Tenri Sompa, Safa Muzdalifah*, Arif Rahman Hakim, M. Padeli**
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
**Corresponding author:* safa.muzdalifah@ulm.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model perilaku pemerintahan daerah lahan basah khususnya dalam bidang pelayanan transportasi. Penelitian ini dilandasi oleh justifikasi ilmiah bahwa terdapat keunikan pada perilaku pemerintahan karena aspek ekologi lingkungan tempat pemerintahan tersebut berada. Objek penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan lembaga kekuasaan daerah yang mengelola suatu wilayah dengan karakteristik wilayah lahan basah. Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah daerah yang hampir seluruh wilayahnya dengan luas tanah tergenang (sebagian besar adalah lahan rawa). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Informan kunci pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bewenang dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga kearsipan. Kerangka teoritis yang digunakan adalah dengan menguraikan konsep perilaku pemerintahan, pelayanan transportasi publik, teori model dan konsep sistem proses pelayanan transportasi publik. Hasil penelitian ini adalah model perilaku pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi publik. Model pelayanan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan menciptakan sistem pelayanan adaptif terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat setempat yang merupakan daerah lahan basah, yaitu dilaksanakan oleh dinas perhubungan dengan penempatan unit-unit pelaksana teknis yang semakin dekat dengan domisili masyarakat.

**Kata Kunci:** Model, Perilaku Pemerintahan, Pelayanan, Transportasi Publik, Daerah Lahan Basah

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah (*government*) adalah organisme (molekul yang memiliki sifat hidup) (Aristoteles *dalam* Sitanggang, 1996) yang perilakunya dipengaruhi oleh ekologi lingkungan (Sitanggang, 1996). Pemerintah berhak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan (Strong, 1965: 10). Tindakan melaksanakan kekuasaan kedaulatan disebut sebagai perilaku pemerintahan *(governance)*. Berdasarkan hal ini, maka perilaku pemerintahan bersifat *unique* dan beraneka ragam sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan. Perbedaan perilaku pemerintahan daerah, tergantung pada lingkungan fisik dan sosial daerah pemerintahan itu berada.

Pemerintah dalam arti sempit mempunyai kehidupan sendiri (Aristoteles *dalam* Sitanggang; 1996). Pemerintah hidup di dalam ekosistem, yakni di dalam sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Hutagalung, 2010). Hubungan timbal balik tersebut tentang cara hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya (autekologi), serta merupakan bentuk satu kesatuan sebagai komunitas organisme (sinekologi).

Pemerintah di dalam ekosistem berkembang bersama lingkungan fisik secara adaptif untuk bertahan hidup, dalam artian pemerintah telah dikembangkan sebagai bagian dari *human ecology* (Sitanggang, 1996). *Human ecology* adalah hubungan antara suatu organisasi dengan lingkungan tempat organisasi tersebut berada (Duncan, 1964). Pemerintah dengan demikian memiliki sistem organ, fungsi organ, struktur organ, dan susunan jaringan yang sistemik layaknya makhluk hidup. Di samping itu, pemerintah juga dijelaskan sebagai organisme yang lahir, mati, berkembang, dan dapat dibentuk (Wasistiono, 2013: 12), bahkan organ yang mati dapat digantikan oleh sistem yang lainnya (Wasistiono, 2013: 11).

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Berikut ini bagan ekologi pemerintahan.

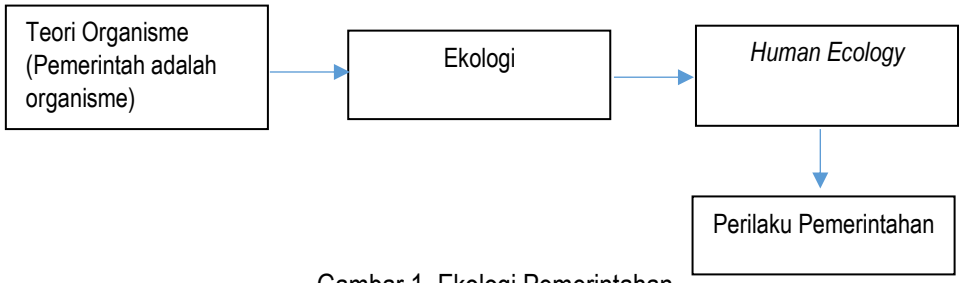


Gambar 1. Ekologi Pemerintahan

Berdasarkan justifikasi ilmiah tersebut, dalam konteks ini perilaku pemerintahan sangat terpengaruh terhadap teori organisme, yakni faktor ekologi lingkungan tempat pemerintahan itu berada memiliki andil signifikan dalam menentukan tindakan pemerintah.

Muara dari rangkaian tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau yang disebut sebagai pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keputusan Kepmen PAN Nomor 58 Th. 2002 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain: a. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. b. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. c. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Salah satu jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan transportasi. Pelayanan transportasi merupakan perwujudan dari pelayanan jasa. Menurut Setijowarno & Frazila (2001), transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana (kendaraan, pipa, dan lain-lain). Selain itu, menurut Salim (2006), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi bisa dikatakan kalau transportasi merupakan usaha mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Melalui rangkaian definisi yang ada, maka pelayanan transportasi adalah kegiatan upaya pemenuhan kebutuhan pemindahan orang ataupun barang ke tempat yang lain oleh penyelenggara pelayanan transportasi publik.

Pelayanan Publik memiliki komponen dasar dalam pelaksanaannya, pertama yaitu penyelenggara pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kedua adalah pelaksana pelayanan publik. Pelaksana pelayanan atau pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Terkait dengan pelayanan transportasi, Mulyono (2009:153) menjelaskan bahwa berdasarkan pelakunya pelayanan transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan oleh pemerintah dan pelayanan oleh swasta. Pelayanan pemerintah lebih diutamakan pada pengaturan transportasi, sedangkan pelaksanaan pelayanan transportasi lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta. Ketiga adalah masyarakat, masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan konsep ekologi pemerintahan, maka pelayanan transportasi di suatu daerah memiliki keunikan tersendiri terkait model pelaksanaannya. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah (Mahmud Achmad, 2008: 1). Tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi-informasi yang dianggap penting untuk dikumpulkan, sehingga ada model yang unik. Satu sistem dapat memiliki berbagai model, bergantung pada sudut pandang dan kepentingan pembuat model.

Pemodelan sistem merupakan kumpulan aktivitas dalam pembuatan model dimana model merupakan perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual suatu penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks. Salah satu wujud dari model adalah sistem. Menurut Romney & Steinbart (2015: 3), sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem atau elemen yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Selain itu, menurut Diana & Setiawati (2011: 3), sistem merupakan "serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu".

Salah satu wilayah dengan ekosistem yang khas adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kabupaten HSU merupakan wilayah dengan karakteristik lahan basah. Lahan basah merupakan wilayah lahan tergenang oleh air dengan kadar air yang tinggi (Tiner, 2017). Tergolong lahan basah adalah lahan tergenang berupa gambut, rawa, dengan air yang statis atau mengalir, tawar, payau atau asin, dan termasuk wilayah air laut dengan kedalaman ketika saat surut tidak lebih dari enam meter. Lahan basah adalah ekosistem penting dalam menopang kelestarian lingkungan global karena berguna untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lahan basah seperti tanah gambut (organik) merupakan wilayah dengan kandungan tinggi karbon. Lahan basah merupakan habitat yang cocok untuk flora maupun fauna (Garg, 2015). Lahan basah berpengaruh penting dalam siklus hidrologi yang terjadi secara alami maupun dari hasil aktivitas manusia (Na *et al*., 2015). Lahan basah dapat menjaga kapasitas air tanah, melindungi kualitas air di permukaan bumi secara alami, serta melindungi bencana alam seperti banjir dan kekeringan (Fickas *et al*., 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga kekuasaan daerah yang mengelola suatu wilayah dengan karakteristik lahan basah. Secara umum Provinsi Kalimantan selatan merupakan wilayah dengan 65% bagian adalah lahan basah. Kabupaten HSU adalah daerah yang hampir seluruh wilayahnya dengan luas tanah tergenang (sebagian besar adalah lahan rawa) secara periodik mencapai 88.220 Ha (Badan Pusat Statistik HSU, 2019: 7). Berdasarkan pada uraian yang ada, bahwa pemerintah adalah organisme yang perilaku pemerintahannya dipengaruhi oleh ekologi lingkungan baik fisik maupun sosial, peneliti menilai bahwa dengan kontur dan postur lingkungan dan kekhasan ekosistem di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, maka terdapat keunikan pada perilaku pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan transportasi. Melalui karya ilmiah ini akan dideskripsikan model perilaku pemerintahan daerah lahan basah di bidang pelayanan transportasi.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitiatif. Menurut Creswell (2007), penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti isu-isu dengan segala kerumitannya yang berfokus pada pemahaman terkait kejadian-kejadian dari frame subyek sendiri (masyarakat pengguna layanan) yang dijadikan sebagai acuan dengan penekanan pada proses. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait hasil peneltian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode ini digunakan dengan pertimbangan relevansinya terhadap materi penelitian, dimana penelitian yang diakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami model pelayanan transportasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan wilayah pemerintahan daerah yang signifikan merupakan Lahan Basah, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.

Di dalam pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan berbagai teknik. Pertama adalah observasi, yaitu mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Pengamatan dilakukan secara langsung ke objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada. Kedua adalah wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak informan. Untuk mendapatkan informasi, peneliti mengadakan tanya jawab kepada informan untuk menggali data dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan, yakni masyarakat Hulu Sungai Utara. Ketiga, langkah terakhir dalam pencarian data adalah rekaman arsip. Melalui rekaman arsip ini peneliti dapat melakukan pengamatan melalui video untuk melihat rekaman kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Sumber ini berguna untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran secara nyata melalui rekaman video dalam melihat berbagai perubahan lahan basah yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menentukan model pemerintahan seperti apa yang cocok untuk diterapkan di lingkungan lahan basah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan langkah metodologis yang dilakukan, maka berikut ini adalah hasil dan pembahasan penelitian. Pada hasil penelitian ini akan diuraikan gambaran umum objek penelitian dan pembahasan data penelitian. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan transportasi.

### 3.1 Pemerintah Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintah yang mengatur, melayani, membangun, dan memberdayakan potensi sumber daya di daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Hal tersebut membuat daerah mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk membuat organisasi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga menempatkan daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana otonomi yang utuh dan luas. Dengan demikian kewenangan berakumulasi pada Pemerintah Pusat lebih bergeser kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga berdampak secara signifikan terhadap fungsi unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemkab HSU mengelola wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 10 Kecamatan. Luas masing-masing Kecamatan, yaitu Kecamatan Danau Panggang (224,49 $km^2$), Kecamatan Paminggir (156,13 $km^2$), Kecamatan Babirik (77,44 $km^2$), Kecamatan Sungai Pandan (45,00 $km^2$), Kecamatan Sungai Tabukan (29,24 $km^2$), Kecamatan Amuntai Selatan (183,16 $km^2$), Kecamatan Amuntai Tengah (57,00 $km^2$), Kecamatan Banjang (41,00 $km^2$), Kecamatan Amuntai Utara (45,09 $km^2$), Kecamatan Haur Gading (34,15 $km^2$)(Badan Pusat Statistik HSU, 2019: 7).

### 3.2 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### 3.2.1 Tugas Dinas Perhubungan

Di dalam pelaksanaan tugas sebagai instansi pelayanan publik, Dinas Perhubungan memliki fungsi tersendiri. Menurut Hamdani selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pasal 3 "Tugas Dishub HSU sesuai dengan Perbup HSU Tahun 2018 membantu Bupati dalam urusan perhubungan". Selain itu dijelaskan pula keutamaan pengelolaan perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Hamdani menjelaskan bahwa:

> "Transportasi merupakan sarana yang utama untuk dikelola dengan baik, mengingat wilayah yang banyak aliran sungai ini memiliki kesulitan tersendiri maka pelayanan atau moda transportasinya diupayakan mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok agar semua dapat menikmati pelayanan. Kan beda itu kalau daerahnya bukan rawa atau sungai masyarakat bisa mandiri menyediakan fasilitasnya, tapi kalau di sini ya harus pemerintah yang menyediakan".

Dinas Perhubungan memiliki fungsi kerja tersendiri. Hamdani menjelaskan bahwa:

> "Dinas Perhubungan memiliki fungsi berdasarkan Perbup yang harus diwujudkan, antara lain perumusan kebijakan bidang perhubungan; pelaksanaan administrasi dinas perhubungan; pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Ini semua ada di Perbup itu yang intinya berpedoman pada itu".

Fungsi lain yang dimaksudkan pada penjelasan di atas dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 antara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan; membina, melaksanakan dan mengawasi lalu lintas angkutan jalan; membina, melaksanakan, dan mengawasi lalu lintas angkutan sungai dan danau; memberikan pelayanan perizinan atau rekomendasi di bidang lalu lintas angkutan darat, sungai dan danau sesuai ketentuan yang berlaku. Di dalam menjalankan fungsi tersebut, Hamdani menjelaskan bahwa Dinas perhubungan memiliki susunan organisasi:

> "Tentunya institusi ini dikepalai Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretariat, nah adakan lo bagiannya Sub Bagian Program dan Data dan Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha. Setelah itu ada pula bidang-bidangnya yang lain, pertama terdapat Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, nah terdiri dari: Seksi Angkutan dan Terminal dan Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan. Bidang berikutnya ada Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, terdiri dari Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan; dan Seksi Keselamatan Lalu Lintas Sungai dan Danau, ada pula UPT yang mengkoordinasikan pelayanan di daerah".

Di dalam pelaksanaannya Dinas perhubungan memiliki Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT. Di dalam Pasal 1 ayat 9 UPT adalah "unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara". Lebih jauh Hamdani menjelaskan pembagian kerja UTP tersebut.

> " … ada tiga UPT di HSU, yang pertama UPT Pengelolaan Terminal Bertaqwa yang berada di Amuntai Tengah Tipe B yang mengkoordinasikan Terminal dan Penyeberangan di Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Haur Gading dan Kecamatan Banjang. Kedua ada UPT Pengelolaan Terminal dan Penyeberangan Sungai Pandan Tipe B pada Dinas Perhubungan, yang mengkoordinasikan terminal dan penyeberangan di Kecamatan Sungai Pandan, yang terakhir ada UPT Pengelolaan Terminal dan Penyeberangan Danau Panggang Tipe B pada Dinas Perhubungan, yang mengkoordinasikan terminal dan penyeberangan di Kecamatan Danau Panggang".

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki fokus pada pengelolaan transportasi sungai. Berikut ini sarana-perhubungan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 1. Jumlah Pelabuhan/Tambatan Perahu di Kabupaten Hulu Sungai Utara

| No | Lokasi (Kecamatan) | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Danau Panggang | 2 |
| 2 | Babirik | 6 |
| 3 | Sungai Pandan | 5 |
| 4 | Paminggir | 6 |
| 5 | Haur Gading | 2 |
| 6 | Amuntai Utara | 1 |
| 7 | Amuntai Tengah | 3 |
| 8 | Amuntai Selatan | 2 |

Sumber: Dokumen Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020

Berdasarkan uraian penjelasan yang meliputi tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Fungsi-fungsi yang dimiliki, struktur organisasi, dan bentuk pemenuhan sarana pelayanan transportasi, hal tersebut sangat berkaitan dengan realisasi sebagai daerah otonom. Penyerahan kewenangan

pusat ke daerah mendorong pengembangan wilayah untuk disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut. Hal ini tercermin dalam pengelolaan perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan menciptakan pengaturan perhubungan yang disesuaikan dengan kontur wilayah lahan basah dengan banyak sungai yang menghubungkan wilayah antar desa maupun kecamatan. Selain unsur adaptif tersebut, dapat dicermati pula bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara memenuhi sarana-sarana transportasi dalam bentuk dermaga hingga di desa-desa agar jalur transportasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam mengidentifikasi model pelayanan transportasi oleh pemerintah daerah, maka diidentifikasi informasi-informasi penting yang ada dan sistem proses pelayanan transportasi tersebut. Melalui rangkaian uraian fakta yang ada, Dinas Perhubungan merupakan instansi yang membantu Bupati di bidang perhubungan. Dalam tugas tersebut Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi perumusan kebijakan bidang perhubungan; pelaksanaan administrasi dinas perhubungan; pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; dan pelaksanaan fungsi lain seperti menyelenggarakan urusan pelayanan umum di bidang perhubungan, membina, melaksanakan dan mengawasi lalu lintas angkutan jalan; membina, melaksanakan dan mengawasi lalu lintas angkutan sungai dan danau; memberikan pelayanan perizinan atau rekomendasi di bidang lalu lintas angkutan darat, sungai dan danau sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam teknis pelaksanaannya Dinas Perhubungan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yang ditempatkan di wilayah kecamatan yang bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan perhubungan antar wilayah. Melalui mekanisme tersebut tercipta suatu sistem pengelolaan moda transportasi yang lebih menjangkau wilayah masyarakat hingga pada daerah terpencil.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka model pelayanan transportasi di daerah lahan basah adalah pelayanan adaptif terhadap ekologi lingkungannya. Model tersebut tergambar melalui sistem proses pelayanan berikut ini:

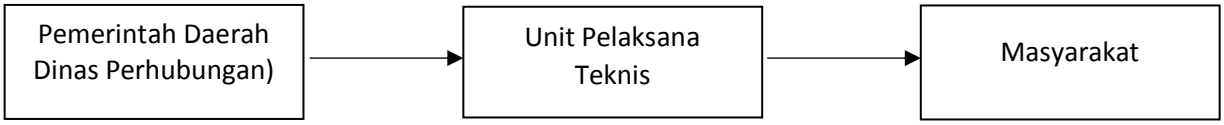


Gambar 2. Model Pelayanan Transportasi di Daerah Lahan Basah

## 4. SIMPULAN

Pada penelitan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat karakteristik khusus pada model sistem pelayanan pemerintahan di daerah lahan basah. Karakteristik tersebut adalah pada proses pelayanan jasa transportasi yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah menyesuaikan dengan kontur wilayah yakni jalur penghubung antar daerah adalah sungai-sungai dan beberapa merupakan daerah tertinggal. Kondisi ini membuat akses antar daerah tidak selancar dan semudah daerah pada umumnya. Atas kondisi ini maka proses pelayanan pemerintahan didesain sedekat mungkin dengan masyarakat yakni meletakkan unit pelaksana teknis hingga pada level kecamatan untuk mengelola dan mengkoordinasikan perhubungan antar wilayah dengan baik.

Saran atas penelitian ini guna pengembangan ilmu pengetahuan adalah dikembangkan pada penelitian perilaku pemerintahan di bidang yang lain dengan fokus pada karakteristik daerah lahan basah. Selain itu, saran bagi implementasi pelayanan pemerintahan di daerah lahan basah yaitu senantiasa melakukan inovasi agar sesuai dengan perkembangan jaman sehingga dapat memberikan pelayanan dengan lebih baik.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut mendukung terealisasinya penelitian ini. Pihak-pihak tersebut meliputi Universitas Lambung Mangkurat yang menyetujui usulan ini, menugaskan, dan sekaligus mendanai proses penelitian. Selain itu ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni Sekretaris Daerah dan Dinas Perhubungan yang berkenan terlibat di dalam peneltian ini.

## 6. DAFTAR ISI

Albrecht, F., Hölbling, D., & Friedl, B. (2017). Assessing the Agreement between EO - Based Semi - Automated Land slide Maps with Fuzzy Manual Land slide Delineation. *The International Archive soft the Photogrammetry, Remote Sensing, and Spatial Information Sciences.* 42 (2/W7): 439–446.

Apriansyah. (2017). Ekologi Pemerintahan. Pustaka Banua. Banjarmasin.

Azehar, H. (2016). Statistik Daerah Kecamatan Sungai Pandan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Chatterjee, K., Bandyopadhyay, A., Ghosh, A., & Kar, S. (2015). Assessment of Environmental Factors Causing Wetland Degradation, using Fuzzy Analytic Network Process: A Case Study on Keola deo National Park, India. *Ecological Modelling*. 316: 1–13.

Chen, M., & Liu, J. (2015). Historical Trends of Wetland Areas in the Agriculture and Pasture Interlaced Zone: A Case Study of the Huangqihai Lake Basin in Northern China. *Ecological Modelling*. 318: 168–176.

Collins, J. (2011). Technical Memorandum No. 4: Wetland Identification and Delineation. San Francisco Estuary Institute and Aquatic Science Center. 4911 Central Avenue Richmond, CA 94804, USA. Cited in https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/cwa401/docs/wrapp/memo4.pdf. 16 November 2019

Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions 2nd Ed. Thousand Oaks. Sage Publications. CA.

Dudwick, N., Kuehnast, K., Jones, V. N., & Woolcock, M. (2006). Analyzing Social Capital in Context: A Guide to Using Qualitative Methods and Data. World Bank Institute. Washington.

Duncan, Otis Dudley. (1964). Social Organization and the Ecosystem. In Handbook of Modern Sociology. R. E. L. Faris, Ed. Chicago: Rand McNally. pp. 36-78.

Fickas, K. C., Cohen, W. B., & Yang, Z. (2016). Landsat-Based Monitoring of Annual Wetland Change in the Willamette Valley of Oregon, USA from 1972 to 2012. *Wetlands Ecology and Management*. 24(1): 73– 92.

Gabrielsen, C. G., Murphy, M. A., & Evans, J. S. (2016). Using A Multiscale, Probabilistic Approach to Muchsan 1981.

Lucknow, Pradesh U., Green. (2017). 7(3-4). ISSN 0975 – 3117.

Romney, Marshall B. & Steinbart. (2015). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13, Alih Bahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. Salemba Empat. Jakarta.

Salim, A.H.A. (2006). Manajemen Transportasi. Jakarta.

Setijowarno, D. & R.B. Frazila. (2001). Pengantar Sistem Transportasi. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.

Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2008). Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa (Edisi Kelima). Kencana Media Group. Jakarta.

Siagin, Sondang P. (1982). Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. PT Gunung Agung. Jakarta.

Sitanggang, H. (1996). Ekologi Pemerintahan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.